

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA
MISKIN (RASKIN) DI DUSUN KADIPOLO WETAN, DESA SALAM,
KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014**



Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh :

**Muhammad Rifki Habibi Hidayatulloh
NIM 12230035**

Pembimbing :

**Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
NIP 19830811 201101 2 010**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifki Habibi Hidayatulloh
NIM : 12230035
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI DUSUN KADIPOLO WETAN, DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Maret 2016
Yang menyatakan,



Muhammad Rifki Habibi Hidayatulloh
NIM. 12230035



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)515816 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/0150/2015

Tugas Akhir dengan Judul :

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
(RASKIN) DI DUSUN KADIPOLO WETAN, DESA SALAM, KECAMATAN
SALAM, KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIFKI HABIBI HIDAYATULLOH

Nomor Induk Mahasiswa : 12230035

Telah diuji pada : 8 April 2016

Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 19830811 201101 2 010

Penguji II

Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.
NIP. 19710526 199703 2 001

Penguji III

Suyanto, S.Sos., M.Si.
NIP. 19660531 198801 1 001

Yogyakarta, 17 April 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

DEKAN



Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsada Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr, wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Rifki Habibi Hidayatulloh
Nim : 12230035
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Tahun 2014.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 28 Maret 2016

Ketua Jurusan

Pembimbing



Dr. Pajar Ratna Indra Jaya, S.Sos, M.Si.
NIP. 195808071985031003

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198308112011012010

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.....

Dari segala jerih payah, suka duka, sedih senang anakmu untuk menyelesaikan tulisan ini tidaklah lepas karena ingin membahagiakanmu, sehingga tulisan ini aku persembahkan untuk :

- 1. Bapak dan Ibu yang selalu mendo'akan anak pertamamu ini dalam setiap langkah yang ku tempuh.*
- 2. Adikku tercinta Rifka Annida yang telah memberikan dukungan untuk kakak satu-satunya dalam hidupmu ini.*
- 3. Untuk keponakan-keponakan kecilku "Saya berharap bisa memotivasi kalian untuk sekolah lebih tinggi lagi dan belajar lebih rajin".*

MOTTO

يُكَلِّفُ لَا وُسْعَهَا إِلَّا¹

Terjemah : *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.* (Qs. Al-Baqoroh : 286)²

Iman seseorang hamba Allah tidak akan lurus sebelum hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus sebelum lidahnya lurus.

(H.R. Ahmad)

¹ Alislamu, <http://www.alislamu.com/7922/surah-al-baqarah-ayat-283-286/>, diakses pada tanggal 04 April 2015.

² Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam “ALHIKMAH” Jakarta, Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 286, *Terjemah Al Qur-an secara Lafziyah*, (Jakarta : CV. Tri Burnama Utama, 1986 M), hlm. 346.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin saya panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Indah. Berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana sosial di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segala usaha, do'a, dan air mata akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini dengan baik. Dalam kesempatan ini juga setulus hati saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Machasain M.A., selaku Pgs Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Ketua Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si., yang telah meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan tenaga dan pemikirannya guna memberikan bimbingan.
5. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. "Terimakasih atas segala pembelajaran selama ini". Dan terimakasih kepada seluruh jajaran Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas pengetahuan serta pengalaman ilmu yang diberikan.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terimakasih kepada Bapak Zuhanif selaku Kepala Desa Salam beserta jajarannya, yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada warga Masyarakat Kadipolo Wetan yang telah berkontribusi untuk membantu terselesaikannya skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Kasi Kesra Desa Salam dan Kepala Dusun Kadipolo Wetan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menggali data.
10. Terimakasih kepada sahabatku tercinta Wahyu Adam, Safarwadi, Hendrik, Imam Hanafi, Andre Anton dan Wahyudi yang telah memberiku semangat dan menjadikanku keluarga serta bagian dari hidup kalian.
11. Sahabat-sahabatku seluruh jurusan PMI yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas support dan dukungannya selama ini.
12. Terimakasih juga untuk semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan ucapan alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa halangan yang berarti. Saya telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menjadikan koreksi serta perbaikan skripsi ini.

Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penyusun khususnya, baik di bidang pendidikan maupun untuk tambahan wawasan.

Yogyakarta, 08 April 2016

Penulis



Muhammad Rifki Habibi H
NIM 12230035

ABSTRAK

Skripsi ini menyajikan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tahun 2014. Penulis memilih tentang evaluasi kebijakan Raskin ini karena ada beberapa hal unik dan menarik di dalam pelaksanaan dan evaluasi program Raskin di Dusun Kadipolo Wetan ini. Terutama yaitu karena di Dusun Kadipolo Wetan ini sebagian besar penduduknya miskin, adanya gerakan sosial di masyarakat yang mengancam tidak akan mengikuti kegiatan organisasi sosial seperti kerja bakti, gotong royong dan lainnya hanya karena kecemburuan sosial dari penerimaan Raskin. Hal tersebut sangat unik dan merupakan alasan yang sulit dipecahkan di dalam masyarakat. Sehingga kebijakan dan resolusi konflik yang terjadi pun harus dipikirkan matang-matang.

Penelitian ini tentang Evaluasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Tahun 2014. Waktu penelitian di lapangan terhitung selama dua bulan yakni dari bulan Desember 2015 sampai bulan Januari 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Raskin dan mendeskripsikan evaluasi kebijakan Raskin di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tahun 2014. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik kualitatif. Peneliti mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Raskin dan evaluasi kebijakan Raskin yang dilakukan di Dusun Kadipolo Wetan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan peneliti menggunakan terstruktur dan tak terstruktur. Analisis keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan temuan lapangan dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian di lapangan diperoleh bahwa pelaksanaan Raskin di Dusun Kadipolo Wetan sudah berjalan sesuai dengan proses pelaksanaan yang ada di Pedoman Umum Raskin 2014 antara lain: perencanaan dan penganggaran, pengelolaan dan pengorganisasian, kebijakan penganggaran, sosialisasi Raskin, penyaluran Raskin dan Pembayaran Harga Tebus Raskin. Secara teknis pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Raskin sudah berjalan sesuai buku Pedoman Umum, namun masih ada beberapa RTS-PM yang mengeluhkan tentang kondisi Raskin yang diterimanya, berbau apek, berketu dan berwarna kuning, maka hal ini sangat disayangkan apabila terjadi terus-menerus. Hasil dari musyawarah evaluasi tersebut RTS-PM pokok memberikan dengan sukarela sebagian beras yang diterimanya kepada warga yang benar-benar miskin namun tidak terdaftar sebagai penerima Raskin. Dalam musyawarah itu Kepala Dusun dan Ketua RT hanya sebagai fasilitator dan menjembatani pelaksanaan musyawarah evaluasi tersebut.

Kata Kunci : Program Raskin, Evaluasi, Kebijakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka	15
G. Kerangka Teori.....	19
H. Metode Penelitian.....	35

BAB II : GAMBARAN UMUM DUSUN KADIPOLO WETAN, DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG

A. Deskripsi Wilayah	44
1. Keadaan Wilayah	44

2. kependudukan.....	45
3. Sarana Prasarana	50
B. Sejarah Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam	50
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Salam	51
D. Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	57
E. Latar Belakang Pendirian program beras untuk keluarga miskin (Raskin)	58
 BAB III: PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI DUSUN KADIPOLO WETAN, DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014	
A. Pelaksanaan Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan	61
1. Perencanaan dan Penganggaran.....	63
2. Pengelolaan dan Pengorganisasian	73
3. Kebijakan Penganggaran	75
4. Sosialisasi Raskin	77
5. Penyaluran Raskin	78
6. Pembayaran Uang HTR (Harga Tebus Raskin).....	97
B. Hasil Evaluasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan	102
1. Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin).....	102
2. Hasil Evaluasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin).....	106
C. Pembahasan Hasil Penelitian	108

1. Pelaksanaan Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin)	108
2. Hasil Evaluasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin).....	122

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran-Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA	131
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	133
--------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	45
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	46
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	47
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	48
Tabel 6 Daftar Sarana Prasarana	49

DAFTAR SINGKATAN

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk program Raskin 2014 melalui mekanisme Musyawarah Desa.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
4. HTR adalah Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD).
5. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
6. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
7. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.

8. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan program Raskin di tingkat Provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
9. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan program Raskin di tingkat Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
10. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
11. RTM adalah Rumah Tangga Miskin sebagai penerima Raskin.
12. RTS adalah Rumah Tangga Sasaran sebagai penerima Raskin.
13. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yang berhak menerima beras dari program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS dalam program Raskin ditandai dengan Kepemilikan KPS atau SKRTM 2014, bagi Rumah Tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.
14. Satker Raskin adalah Satuan Kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.

15. SKRTM 2014 adalah Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin 2014 yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musyawarah Desa tahun 2014.
16. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
17. SPPB/DO adalah Surat Perintah Penyerahan Barang/*Delivery Order* merupakan perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
18. TB adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM.
19. TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kantor Desa Salam.....	52
Gambar 2 Raskin Turun dari BULOG	69
Gambar 3 Raskin sedang Dihitung oleh Kasi Kesra Desa Salam	70
Gambar 4 Raskin di Titik Bagi Rumahnya Ibu Siti Mukaromah.....	72
Gambar 5 Kondisi Infrastruktur Jalan Masuk Dusun Kadipolo Wetan	96

DAFTAR SINGKATAN

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk program Raskin 2014 melalui mekanisme Musyawarah Desa.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
4. HTR adalah Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD).
5. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
6. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
7. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
8. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan program Raskin di tingkat Provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.

9. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan program Raskin di tingkat Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
10. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
11. RTM adalah Rumah Tangga Miskin sebagai penerima Raskin.
12. RTS adalah Rumah Tangga Sasaran sebagai penerima Raskin.
13. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yang berhak menerima beras dari program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS dalam program Raskin ditandai dengan Kepemilikan KPS atau SKRTM 2014, bagi Rumah Tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.
14. Satker Raskin adalah Satuan Kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
15. SKRTM 2014 adalah Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin 2014 yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musyawarah Desa tahun 2014.
16. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Raskin.

17. SPPB/DO adalah Surat Perintah Penyerahan Barang/*Delivery Order* merupakan perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
18. TB adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM.
19. TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini digunakan untuk menghindari kesalahpahaman tentang penelitian dengan judul “*Evaluasi Kebijakan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Tahun 2014*”, maka penting adanya penjabaran dan penjelasan terkait istilah tema penelitian tersebut. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penilaian.¹ Penilaian di sini maksudnya adalah penilaian secara teknis dan ekonomis suatu kejadian.² Sedangkan kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (*course of action*), kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guideline*), rencana (*plan*), peta (*map*) atau strategi yang dirancang untuk menerjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*).³

Jadi evaluasi kebijakan dalam skripsi ini adalah penilaian secara teknis dan ekonomis program Raskin dalam menilai seperangkat tindakan,

¹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 238.

²*Ibid*, hlm. 276.

³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), hlm. 107.

kerangka kerja, petunjuk, rencana, peta, atau strategi kebijakan sosial yang dirancang oleh Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial berupa pangan yaitu Raskin.

2. Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)

Raskin adalah program Nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak atas pangan. Jika rata-rata kebutuhan beras sebesar 139 kg/jiwa/tahun dan setiap RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) terdiri atas 4 (empat) jiwa, maka program Raskin memberikan bantuan sebesar 32% dari kebutuhan beras setiap tahunnya. Sejak tahun 1998 baik OPK maupun program Raskin belum dapat memberikan bantuan pangan secara maksimal dan bervariasi sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah.⁴ Raskin sebagai program bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, merupakan bagian tak terpisahkan dari program ketahanan pangan.

Sebagai program Nasional maka program ini melibatkan berbagai pihak baik vertikal maupun horisontal. Secara horisontal semua sektor terkait memiliki tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Secara vertikal program ini bukan milik Pemerintah Pusat semata-mata, akan tetapi juga milik Pemerintah Daerah.

Sebenarnya Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan Nasional, tetapi pelaksanaan dan penyalurannya sangat bergantung pada

⁴Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, *Pedoman Umum Raskin Beras Untuk Rumah Tangga Miskin*, (Jakarta: Bidang Kesejahteraan Rakyat, 1991), hlm. iv.

peran Pemerintah Daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efektivitas program Raskin dengan berperan aktif memberikan kontribusi seperti melaksanakan sosialisasi, pengawasan, mutu, angkutan, biaya operasional, subsidi harga tebus, Raskin daerah dan lain-lain.

3. Dusun Kadipolo Wetan

Dusun Kadipolo Wetan adalah suatu Dusun yang terletak di Daerah perbatasan Jogja-Magelang, tepatnya di Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Dusun ini sangat mudah dikunjungi karena berada dekat dengan jalan utama Jogja-Magelang, yaitu sekitar 400 m arah barat dari jembatan Krasak atau 6 KM arah Jogja jika dari Magelang. Dusun ini terbilang cukup asri dan masih mempunyai banyak hamparan sawah di sekitarnya, karena mayoritas warga Dusun Kadipolo Wetan berprofesi sebagai petani. Hasil utama dari cocok tanam warga ini berupa salak, padi, jagung, kelapa, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil tema penelitian tentang evaluasi kebijakan Raskin di Dusun Kadipolo Wetan. Jadi maksud dari judul “*Evaluasi Kebijakan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Tahun 2014*” adalah peneliti mengevaluasi, mengkaji dan mendeskripsikan hasil evaluasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang dilaksanakan di Dusun Kadipolo

Wetan pada tahun 2014 sehingga penelitian ini dapat berguna bagi Desa Salam dalam melaksanakan program Raskin.

4. Tahun 2014

Peneliti memilih untuk mengevaluasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) pada tahun 2014 ini tentu ada pertimbangan dan tujuan yang spesifik, karena untuk mengevaluasi sebuah program yang telah berjalan itu akan memudahkan kita dalam melihat data hasil perjalanan suatu program yang akan diteliti tersebut. Dalam penelitian apalagi di sini menyangkut tentang evaluasi maka dari itu akan lebih sempurna ketika kita juga mencantumkan tahun atau periode objek yang diteliti sehingga data hasil penelitiannya akan fokus dan spesifik ke topik yang dituju oleh peneliti.

Jadi maksud judul *“Evaluasi Kebijakan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Tahun 2014”* secara keseluruhan adalah penelitian tentang evaluasi kebijakan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan tentang aktivitas pelaksanaan program Raskin, yang meliputi perencanaan, aksi kebijakan dan hasil evaluasi kebijakan Raskin di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Tahun 2014.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Raskin adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program Raskin tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan termasuk dalam Kluster 1 tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang kebijakan perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi Nasional.

Indonesia adalah Negara yang sekarang menganut *welfare state*, mendefinisikan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2009 sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa Pemerintah Indonesia mengupayakan banyak cara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Di Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun.⁵ Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia

⁵ Badan Pusat Statistik, 2011.

menjadi Negara konsumen beras terbesar di Dunia. Beras menjadi komoditas Nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan Nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.⁶

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya sebesar 0,37%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan maret 2013 kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012.⁷

Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

miskin dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam Negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) selain itu program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan Nasional. Program Raskin dapat dicapai melalui Koordinasi antara instansi/lembaga terkait, baik di tingkat Pusat maupun Daerah koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985.
3. Undang-undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan.
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

7. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
12. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
13. Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014.
14. Inpres No. 3 Tahun 2012, tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
15. Permendagri No. 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Permenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin.
17. Kepmenko Kesra No. 57 Tahun 2012, tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

18. Instruksi Mendagri No.: 541/3150/SJ tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.

Terdapat beberapa unsur dalam Raskin, antara lain adalah Pedoman Pelaksanaan Program Raskin, Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi, Tim Raskin Divisi Regional (Divre), Satker Raskin, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, Titik Distribusi, Rumah Tangga Miskin (RTM), Musyawarah Desa/Kelurahan, Beras Standar Kualitas BULOG, Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Raskin.

Tidak seluruh masyarakat Indonesia yang berhak atas Raskin, hanya mereka yang tergolong miskin dan rawan pangan di daerah tertentu mendapat hak untuk menerima Raskin. Untuk memilih kelompok yaitu sesuai kriteria yang ditetapkan data keluarga miskin dan rawan pangan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Desa, LSM dan sebagainya.

Kemudian data tersebut dibawa ke musyawarah Desa untuk diteliti kebenarannya dan dikoreksi, apabila ada data yang rangkap atau tidak sesuai, kemudian musyawarah Desa memilih dan menetapkan keluarga yang termasuk paling miskin dan rawan pangan sesuai jumlah yang disediakan. Pemilihan dapat menggunakan sistem rangking sehingga hanya mereka yang

benar-benar paling miskin dan rawan pangan saja yang dipilih. Hasil musyawarah Desa perlu diketahui oleh masyarakat.

Jumlah beras yang diberikan kepada setiap keluarga miskin adalah 15 kg beras setiap bulan dengan harga Rp. 1.600/kg. Harga tersebut adalah harga di Titik Distribusi. Biaya dari Titik Distribusi ke tempat masing-masing ditanggung oleh masing-masing penerima. Raskin dibagikan setiap bulan di Titik Distribusi, waktu pembagian setiap bulan sesuai jadwal yang disepakati. Titik Distribusi yaitu lokasi yang disepakati yang diusahakan dekat dengan penerima, lokasi tersebut adalah di Desa Salam atau Balai Desa Salam. Raskin dibagikan oleh petugas yang ditunjuk di Titik Distribusi yang bersangkutan.

Penanggungjawab pembagian Raskin di Desa adalah Kepala Desa. Raskin berasal dari gudang BULOG, beras tersebut diangkut dari gudang oleh Satgas Raskin ke setiap Titik Distribusi. Satgas Raskin terdiri dari petugas BULOG, petugas Pemda atau yang ditunjuk.

Dalam penyaluran Raskin sering ditemui kendala-kendala, kendalanya bisa dari masyarakat bahkan dari aparaturnya itu sendiri. Jika ditemui Rumah Tangga Penerima Manfaat tidak membayar uang tebus Raskin tepat waktu maka pengelola Raskin akan terlambat pula menyetorkan kepada BULOG, hal ini sangat menghambat penyaluran Raskin bulan berikutnya dan yang menjadi korban adalah masyarakat.

Kelancaran penyaluran Raskin sangat bergantung dari disiplin Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dan seluruh pelaku yang terlibat dalam Raskin. Keluarga penerima harus lancar membayar uang beras pada petugas di

Titik Distribusi. Petugas Titik Distribusi harus lancar dan segera menyetor uang hasil penjualan Raskin ke BULOG yang selanjutnya harus disetor ke pusat. Penundaan pembayaran hasil penjualan Raskin tidak dibenarkan, karena apabila ada ketidaklancaran dari salah satu Titik Distribusi tersebut akan menyebabkan keterlambatan penyaluran Raskin berikutnya, yang rugi adalah masyarakat sendiri. Pembayaran maupun kelengkapan administrasi Raskin harus menjadi prioritas utama sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas.

Beras miskin yang disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) seharusnya beras yang berkualitas baik. Tetapi yang selama ini terjadi RTS-PM tersebut kebanyakan menerima beras dengan kualitas beras yang rendah dan tidak layak dikonsumsi, beras yang diterima RTS-PM berbau apek, berketu dan berwarna kuning. Permasalahannya bukan hanya itu, seringkali terjadi masyarakat yang seharusnya berhak dan layak mendapatkan Raskin namun tidak terdaftar di (Daftar Penerima Manfaat 1) DPM 1, maka mereka tidak mendapatkan Raskin sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Apalagi jika beras miskin tersebut sudah sampai di Titik Bagi, harga Raskin tersebut menjadi Rp. 2000/kg setelah mendapat persetujuan dari RTS-PM karena diperhitungkan dengan ongkos transport angkut beras dari Desa masing-masing, dan jumlah kuota beras harus seimbang, karena jika jumlah RTS-PM lebih banyak dari Raskin yang didistribusikan maka akan banyak RTS-PM yang tidak dapat menerima jatah Raskin, yang dirugikan adalah RTS-PM dan akan menyebabkan kecemburuan sosial.

Pelaksanaan program Raskin tahun 2014 di Kabupaten Magelang dikoordinasikan bersama Tim Koordinasi Pelaksana Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Magelang. Setelah RTS-PM ditetapkan melalui musyawarah Desa, pihak kecamatan selaku Tim Koordinasi Kecamatan menerima daftar nama-nama RTS-PM yang disebut DPM 1 pada saat penyaluran beras Raskin.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian tentang Raskin. Perlindungan sosial yang berupa kebijakan pangan ini dimulai sejak krisis pangan tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara *targeted* kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat. Program ini sangat strategis dan merupakan program Nasional lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal.⁸

Program Raskin ini merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Program ini terus berjalan sampai saat ini dengan mengikuti kemampuan subsidi yang dapat diberikan

⁸Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, *Pedoman Umum Raskin Beras Untuk Rumah Tangga Miskin*, hlm. 1.

pemerintah kepada keluarga miskin dan perkembangan data keluarga miskin yang terus dilakukan penyempurnaan.

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, melainkan kebijakan tersebut harus diawasi dan salah satu mekanisme tersebut adalah dengan mengevaluasi kebijakan Raskin tersebut. Evaluasi sangat penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan yaitu untuk menghindari kebiasaan buruk administrasi publik Indonesia dan setiap kebijakan tidak dapat diganti dengan serta-merta karena keinginan atau selera pejabat yang pada saat itu memegang kewenangan publik. Dengan adanya evaluasi maka akan tampak jelas hasil dari kebijakan Raskin tersebut. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji tema *“Evaluasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Tahun 2014”*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tahun 2014?
2. Bagaimana evaluasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tahun 2014?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tahun 2014.
2. Mendeskripsikan evaluasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tahun 2014.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan, khususnya pengembangan ilmu tentang pengembangan masyarakat dalam evaluasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan.
- b. Sebagai pengembangan keilmuan pengembangan masyarakat khususnya dalam rangka evaluasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin).

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi Dusun Kadipolo Wetan terkait dengan kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin).
- b. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi Desa Salam dalam pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) kedepannya.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam pengembangan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) ke depan yang lebih baik lagi.

F. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian tentang evaluasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, maka peneliti perlu melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian. Sebelumnya telah ada beberapa hasil penelitian, buku maupun artikel yang membahas tentang program Raskin. Seperti artikel yang tertera dibawah ini:

Pertama skripsi Shin Auly Frida S, Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang 2011. Penelitian ini berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) Studi Kasus: Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok*”.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah dengan tujuan mendeskripsikan proses pelaksanaan program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, menganalisa efektivitas pelaksanaan program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan program Raskin di Kelurahan VI Suku sudah sesuai dengan Pedoman Umum (PEDUM) Raskin tahun 2010 dan pelaksanaan program Raskin tersebut sudah berjalan efektif, dengan tingkat

keberhasilan rata-rata 73,1%.⁹ Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Program Raskin, sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini yaitu efektivitas pelaksanaan Raskin dan penelitian yang dilakukan penulis yaitu evaluasi kebijakan program Raskin.

Kedua skripsi Debie Puspasari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Sarjana Ilmu Administrasi, yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi*”.

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2010, dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami Efektivitas Pelaksanaan Program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan pemaparan dalam bab-bab diatas diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan EKPPD 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi tidak efektif. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari dimensi proses, *input* dan *output*.¹⁰ Adapun persamaan dengan yang peneliti lakukan yaitu program evaluasi. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi ini yaitu efektivitas pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi.

⁹Shin Auly Frida S, *Efektivitas Pelaksanaan Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) Studi Kasus di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kotta Solok*, skripsi ini tidak diterbitkan, (Padang: Universitas Andalas, 2011), hlm. 105.

¹⁰Debie Puspasari, *Efektivitas Pelaksanaan Program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2010 Di Kota Depok dan Kota Cimahi*, skripsi tidak diterbitkan, (Depok, 2012), hlm. 134.

Ketiga tesis oleh Rismannafar Tri Darajat, Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, yang berjudul “*Analisis Kebijakan Publik*”.

Penelitian ini mendeskripsikan prosedur dan mekanisme pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) dengan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan tersebut dalam sektor publik di Kabupaten Majalengka. Hasil analisis data yang bersumber dari wawancara yang mendalam dengan *key informan* serta hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa terdapat alur yang khas dari kondisi para pihak yang terlibat dalam pengadaan (Pemerintah, Rekanan, LSM). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kebijakan (Keppres 80/2003) masih dilaksanakan dalam cakupan yang luas dan tidak spesifik, sehingga yang terjadi di Kabupaten Majalengka adalah interpretasi yang mungkin berbeda dengan daerah lain.¹¹ Adapun persamaan dengan yang peneliti lakukan yaitu tentang kebijakan. Sedangkan perbedaannya yaitu melakukan analisis tentang faktor-faktor penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan dalam sektor publik.

Keempat tesis Arif Wahyudi, Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, yang berjudul “*Evaluasi Kinerja Program Raskin Di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Pelaksanaan 2008 Di Kecamatan, Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren dan Serpong*”.

¹¹Rismannafar Tri Darajat, *Analisis Kebijakan Publik*, tesis tidak diterbitkan, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), hlm. iv.

Penelitian ini membahas tentang evaluasi kinerja program Raskin di Kabupaten Tangerang dengan tujuan menganalisis kebijakan Bulog Sub Divisi Regional Banten/Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pendistribusian Raskin, menganalisis mekanisme pendistribusian Raskin di Kabupaten Tangerang, mendapatkan faktor penghambat distribusi Raskin kepada masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa realisasi Raskin di Kabupaten Tangerang masih rendah. Hal ini disebabkan belum adanya dukungan yang cukup dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Tim koordinasi pelaksanaan Raskin Daerah 2008 yang dibentuk tidak berfungsi. Sosialisasi, pemantauan hingga evaluasi program Raskin sepanjang tahun 2008 tidak dilakukan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan Raskin yang tidak memenuhi semua indikator 6 T.¹² Adapun persamaan dengan yang peneliti lakukan yaitu evaluasi program raskin. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini kinerja program Raskin di Kabupaten Tangerang, dan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu evaluasi kebijakan program raskin di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tahun 2014.

Dalam pemaparan di atas sudah diketahui bahwasanya penelitian-penelitian di atas mempunyai objek kajian yang sama yaitu tentang program Raskin, akan tetapi fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, karena penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada evaluasi kebijakan program Raskin. Sedangkan perbedaannya yaitu, dari skripsi Shin

¹²Arif Wahyudi, *Evaluasi Kinerja Program Raskin di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Pelaksanaan 2008 di Kecamatan Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong)*, tesis tidak diterbitkan, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 91.

Auly Frida S, berfokus pada efektivitas pelaksanaan Raskin. Skripsi Debie Puspasari, berfokus pada efektivitas pelaksanaan program evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2010 di Kota Depok dan Kota Cimahi. Tesis Rismannafar Tri Darajat, berfokus pada analisis kebijakan publik. Tesis Arif Wahyudi berfokus pada evaluasi kinerja program raskin di Kabupaten Tangerang.

Dari keempat penelitian yang pernah dilakukan diatas, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya karena penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang dilaksanakan di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tahun 2014. Peneliti beranggapan adanya perbedaan pembahasan dalam penelitian ini, terutama apabila ditinjau dari sudut pelaksanaan kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu peneliti berusaha untuk mengkaji dan mendeskripsikan evaluasi kebijakan Raskin tersebut. Atas dasar hal diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji ke dalam skripsi.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada di rumusan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai "*Evaluasi Kebijakan Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo*

Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Tahun 2014”

dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian ini penulis mengambil beberapa teori untuk membangun kerangka teori yang berfungsi sebagai alat analisis bagi permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian bermula dengan kajian kebijakan.

1. Pengertian Kebijakan Secara Umum

Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (*course of action*), kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guideline*), rencana (*plan*), peta (*map*) atau strategi yang dirancang untuk menerjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang kesejahteraan sosial (*sosial welfare*).¹³ Urusan kesejahteraan sosial senantiasa menyangkut orang banyak, maka kebijakan sosial seringkali diidentikkan dengan kebijakan publik. Kebijakan sosial itu luas yaitu mencakup kesehatan, pendidikan, pangan atau bahkan perumahan. Di dalam penelitian ini peneliti membahas tentang kebijakan sosial berupa ketahanan pangan yaitu kebijakan pemerintah mengenai Raskin. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.¹⁴

¹³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, hlm. 107.

¹⁴Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Pringwulung: Media Pressindo, 2007), hlm. 33.

2. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu Negara akan memengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponsnya, yakni memasukannya ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan.¹⁵ Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kebijakan sangat berperan penting dalam sebuah proses kebijakan yang berlangsung di dalam suatu Negara maupun pemerintahan. Sebagaimana dalam pelaksanaan kebijakan Raskin karena di sini pengangguran, jumlah penduduk, struktur sosial dan sistem ekonomi masyarakatnya yang sangat beragam dan mayoritas adalah penduduk miskin sehingga sangat tepat jika pemerintah mencanangkan program Raskin di Indonesia.

3. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi.¹⁶ Untuk sebuah kebijakan makro seperti kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) ini, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi

¹⁵ AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm. 14.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa bahkan sampai Pemerintah di Dusun.

kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor maupun unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan dipengaruhi oleh banyak hal seperti variabel individual maupun variabel organisasional yang satu sama lain antara variabel tersebut saling berinteraksi satu sama lain.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁷ Sebelum sebuah kebijakan mencapai tujuannya maka pasti ada tahap dan prosesnya dalam implementasi yaitu bisa berupa program maupun sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun lembaga-lembaga yang lain.

4. Teori Implementasi Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.¹⁸ Berikut adalah variabel besarnya dari teori Merilee S. Grindle yaitu mencakup:

“Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; Jenis manfaat yang diterima oleh target group; Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; Apakah letak sebuah program sudah tepat; Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.”

¹⁷ Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: PT Elex Media komputindo, 2008), hlm. 494.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

Selain itu dalam variabel lingkungan kebijakan ini mencakup: Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi yang diperlukan.

5. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan penelitian.¹⁹

6. Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

proses kebijakan.²⁰ Dengan demikian evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan.

Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program.²¹ Dari pemahaman peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.²² Jadi evaluasi kebijakan adalah pengidentifikasian terhadap kegiatan atau program dari arah tindakan yang diterapkan oleh aktor dalam mengatasi masalah atau persoalan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.²³ Konsep kebijakan ini penulis anggap tepat karena memusatkan pada apa yang sebenarnya

²⁰Wikipedia Bahasa Indonesia, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title:Kebijakan Publik&oldid=11117081](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title:Kebijakan_Publik&oldid=11117081) diakses tanggal 19 Desember 2015.

²¹*Ibid.*, hlm. 119.

²²Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Pringwulung: Media Pressindo, 2007), hlm. 36.

²³*Ibid.*, hlm. 21.

dilakukan untuk memecahkan masalah, selain itu konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan berbagai alternatif pemecahan yang ada.

Sementara itu, Amir Santoso dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori.²⁴ *Pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah dengan kata lain pendapat yang pertama ini melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan yakni, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Sedangkan pandangan yang kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.

*“Tujuan adanya evaluasi antara lain untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan, mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran, mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana (externalities).”*²⁵

Jadi dengan adanya evaluasi nantinya dapat mengukur dampak langsung kepada kelompok sasaran dan mengidentifikasi dengan jelas tentang tingkat pencapaian tujuan suatu program.

Definisi lain mengenai evaluasi dikemukakan oleh Malcom Provus, yang mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada

²⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

²⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, hlm. 119.

dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih.²⁶ Kedua definisi tersebut secara jelas menerangkan bahwa evaluasi adalah sebuah kegiatan penilaian. Meskipun demikian, istilah evaluasi, penilaian dan pengukuran adalah suatu hal yang berbeda. Evaluasi lebih luas ruang lingkupnya daripada penilaian yang hanya lebih terfokus pada aspek tertentu yang merupakan bagian dari ruang lingkup tersebut.

Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*) lebih merujuk pada “manifestasi nyata” dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.²⁷

7. Model Evaluasi UCLA

Menurut alkin dalam Farida Yusuf model UCLA didefinisikan sebagai suatu proses meyakinkan suatu keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan data ringkasan yang berguna bagi pembuat keputusan. Ada lima evaluasi dalam model UCLA antara lain:²⁸

- 1) *System assesment*, yaitu evaluasi dengan cara memberikan informasi tentang suatu keadaan atau posisi sistem. Dengan cara ini maka sebuah evaluasi akan diketahui bagaimana posisi sistemnya.
- 2) *Process planning*, digunakan untuk membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil dalam memenuhi kebutuhan yang masuk dalam kriteria dari sebuah program.

²⁶Farida Yusuf, *Evaluasi Program*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 3.

²⁷*Ibid.*, hlm. 7.

²⁸*Ibid.*, hlm. 3.

- 3) *Program implementation*, digunakan untuk menyiapkan informasi dalam menyiapkan program. Dengan cara seperti ini maka implementasi programnya dapat lebih terstruktur.
 - 4) *Program improvement*, memberikan informasi tentang pelaksanaan program yang akan dijalankan kedepannya sehingga lebih tertata dalam semua proses pelaksanaannya.
 - 5) *Program certification*, digunakan untuk memberikan informasi tentang nilai sebuah program dengan tujuan program tersebut dapat terukur apakah sudah memenuhi kriteria atau belum.
8. Perencanaan Program

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial.²⁹ Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan memang benar sekali bahwa sebuah perencanaan dari suatu program itu sangat dibutuhkan untuk menunjang dan mendukung jalannya pemberdayaan masyarakat agar lebih terarah dalam pelaksanaan program itu.

Proses perencanaan program, dari setiap perencanaan sosial dibuat dengan mengikuti tahapan atau siklus tertentu dan secara garis besar dirumuskan menjadi 5 tahapan yaitu:

²⁹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, hlm. 71.

a. Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang akan direspon oleh suatu program. Identifikasi masalah perlu dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan teknik-teknik yang tepat. Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan asesmen kebutuhan (*need assessment*).³⁰

Asesmen kebutuhan dapat diartikan sebagai penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan. Dalam kaitan ini ada 5 jenis kebutuhan diantaranya:

- 1) Kebutuhan absolute (*absolute need*) adalah kebutuhan minimal atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat mempertahankan kehidupannya.
- 2) Kebutuhan normatif (*normative need*) adalah kebutuhan yang didefinisikan oleh ahli atau tenaga professional dan didasarkan dari standar tertentu.
- 3) Kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) adalah sesuatu yang dianggap atau dirasakan orang sebagai kebutuhannya.
- 4) Kebutuhan yang dinyatakan (*stated need*) adalah kebutuhan yang dirasakan yang diubah menjadi kebutuhan berdasarkan banyaknya permintaan.

³⁰*Ibid.*, hlm. 71.

- 5) Kebutuhan komparatif (*comparative need*) adalah kesenjangan antara tingkat pelayanan yang ada di wilayah-wilayah yang berbeda untuk kelompok orang yang memiliki karakteristik sama.

b. Penentuan Tujuan

Tujuan dapat didefinisikan sebagai kondisi di masa depan yang ingin dicapai.³¹ Maksud utama penentuan tujuan adalah untuk membimbing program ke arah pemecahan masalah dan tujuan ini dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Dengan adanya tujuan yang jelas maka pelaksanaan sebuah program akan berhasil dengan hasil yang maksimal.

c. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program

Dalam proses perencanaan sosial, para perencana dan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan selayaknya bersama-sama menyusun pola rencana intervensi yang komprehensif.³² Program dapat dirumuskan sebagai suatu perangkat kegiatan yang saling tergantung dan diarahkan pada pencapaian satu atau beberapa tujuan khusus. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses perumusan program:

- 1) Identifikasi program alternatif, penyusunan program merupakan tahap yang membutuhkan kreativitas, oleh karena itu sebelum satu program dipilih ada baiknya jika diidentifikasi beberapa program alternatif.

³¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm. 71.

³²*Ibid.*, hlm. 71.

- 2) Penentuan hasil program, bagian dari identifikasi program alternatif adalah penentuan hasil apa yang akan diperoleh dari setiap program.
- 3) Penentuan biaya, informasi tentang biaya mencakup keseluruhan biaya program maupun biaya per hasil.
- 4) Kriteria pemilihan program, setelah program-program alternatif diidentifikasi, maka harus dilakukan pilihan diantara mereka dan didasarkan atas rasional pada kriteria tertentu.

d. Pelaksanaan Program

Tahap implementasi program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan.³³ Ada dua prosedur dalam melaksanakan program, yaitu:

- 1) Merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program.
- 2) Merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana.

Dari kedua prosedur dalam melaksanakan program di atas akan lebih baik dengan menggunakan yang nomor satu yaitu merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program karena dengan perincian operasional yang akan dijalankan akan lebih serarah dan terstruktur.

³³*Ibid.*, hlm. 71.

e. Evaluasi Program

Dalam tahap evaluasi program, analisis kembali kepada permulaan proses perencanaan untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.³⁴ Evaluasi menjadikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Evaluasi baru dapat dilaksanakan kalau rencana sudah dilaksanakan, namun perencanaan yang baik harus sudah dapat menggambarkan proses evaluasi yang akan dilaksanakan.

Dari evaluasi sebuah program disanalisis akan didapatkan hasil dari sebuah perencanaan program yang telah berjalan, sehingga akan diketahui tentang bagaimana hasil dari sebuah kebijakan yang sudah berjalan tersebut.

9. Pedoman Umum Raskin

Untuk melaksanakan program Raskin ini, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menerbitkan Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2014.³⁵ Dalam Pedum Raskin ini dijelaskan berbagai hal tentang pelaksanaan Raskin yaitu tujuan, sasaran, manfaat, pengelolaan, pengorganisasian, perencanaan dan penganggaran, mekanisme pelaksanaan, pengendalian dan pengaduan. Secara rinci berbagai hal tentang pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) tersebut adalah sebagai berikut:

³⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

³⁵ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, *Pedoman Umum Raskin Beras Untuk Rumah Tangga Miskin*, hlm. 7.

- a. Tujuan Raskin; Tujuan program Raskin untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
- b. Sasaran; Sasaran program Raskin tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.
- c. Manfaat; Manfaat program Raskin adalah peningkatan akses pangan baik secara fisik beras yang tersedia di Titik Distribusi maupun ekonomi harga jual yang terjangkau kepada RTS, stabilisasi harga beras di pasaran, pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, menjaga stok pangan nasional dan membantu pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Pengelolaan dan Pengorganisasian; Sebagai implementasinya maka dikelola dan dibentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan pelaksana distribusi Raskin di Desa. Penanggungjawab pelaksanaan program Raskin di tingkat Pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di tingkat Provinsi adalah Gubernur, di tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di tingkat kecamatan adalah Camat dan di tingkat Desa adalah Kepala Desa. Tugas Tim Koordinasi Raskin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah merencanakan melaksanakan dan

mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program Raskin struktur Pemerintahan di bawahnya.

- e. Perencanaan dan Penganggaran; Perencanaan dan penganggaran program Raskin tahun 2014 mengacu pada undang-undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara penyediaan, perhitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- f. Mekanisme Distribusi dan Pelaporan; distribusi Raskin dimulai dengan Surat Permintaan Alokasi dari Bupati kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin dan RTS-PM masing-masing Kecamatan atau Desa. Proses berlanjut dari gudang BULOG ke Titik Distribusi dan penyaluran ke RTS-PM. Setiap tahapan serah terima dicatat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan identitas penerima secara jelas. Berdasarkan BAST Perum BULOG membuat rekapitulasi berita acara pelaksanaan Raskin masing-masing kecamatan yang ditandatangani bersama, yang diteruskan dengan pembuatan Berita Acara pelaksanaan Raskin Kabupaten. Berdasarkan Berita Acara pelaksanaan Raskin Kabupaten Magelang, BULOG Divisi Regional Magelang membuat laporan pelaksanaan Raskin ke kantor Pusat Perum BULOG.

- g. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi; Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi dan dari pelaksana distribusi kepada Satker Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp.1.600,-/kg netto. Uang HTR yang diterima pelaksana distribusi dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin dan dibuat tanda terima pembayaran rangkap 3 oleh Satker Raskin.
- h. Sosialisasi; Sosialisasi program Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi sekaligus pemahaman yang sama dan kepada seluruh pemangku kepentingan terutama pelaksana, masyarakat umum dan khususnya kepada RTS-PM. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan Pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak-hak kewajiban masing-masing.
- i. Monitoring dan Evaluasi; Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang kemudian Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
- j. Pengendalian; Pelaksanaan program Raskin harus dapat dikendalikan dan dengan adanya pengawasan pelaksanaan

penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- k. Pengaduan; Pengaduan pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain yang akan ditanggapi oleh Kementerian atau Lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan agar tercapai sesuai dengan yang diinginkan.³⁶ Sedangkan penelitian adalah memeriksa dengan teliti atau melakukan penyelidikan.³⁷ Kemudian metode penelitian menurut Rosdy Ruslan adalah kegiatan ilmiah yang menyangkut suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya dalam memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³⁸

³⁶H.S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 230.

³⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 1234.

³⁸Rosdy Ruslan, *Pengertian Metode Penelitian*, <http://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/> diakses pada tanggal 23 September 2015 pukul 10.15 WIB.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan hasil evaluasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan.

2. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan teknik kualitatif. Penelitian deskriptif, peneliti menggambarkan secara jelas kegiatan penelitian yang dilakukan dengan sistematis.³⁹ Sedangkan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan tanpa dimaksudkan untuk menarik generalisasi, melainkan sebagai upaya menggali makna dibalik suatu fenomena.⁴⁰ Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian deskriptif-kualitatif adalah peneliti menggambarkan dan meneliti fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini peneliti mendeskripsikan kegiatan yang ada di lapangan yaitu pelaksanaan kebijakan Raskin di Dusun Kadipolo Wetan.

3. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁴¹ Dari penelitian

³⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 14.

⁴⁰Ambo Upe dan Damsid, *Asas-Asas Multiple Researches*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm xx-xxi.

⁴¹Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5.

ini yang menjadi sumber penelitian adalah pelaksanaan kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan. Penelitian ini juga menggunakan informan sebagai subyek sekunder yang dapat memberikan informasi terhadap apa yang diteliti oleh peneliti, informan tersebut yaitu Kepala Desa Salam, Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Salam, Kepala Dusun Kadipolo Wetan, Bapak Slamet Sasongko, Bapak Giri Karsono, Ketua RT 06, Ibu Nur, Ibu Siti Mukaromah sebagai RTS-PM di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam.

4. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah *Evaluasi Kebijakan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tahun 2014*. Penelitian ini meneliti mengenai pelaksanaan kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) dan hasil dari evaluasi kebijakan Raskin di Dusun Kadipolo Wetan.

5. Data dan Sumber Data

No .	Masalah yang Diajukan	Data yang Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
1.	Pelaksanaan Kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tahun 2014.	1. Perencanaan Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin). 2. Pelaksanaan Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin).	Wawancara, dokumentasi dan observasi	Pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Buku Pedoman Umum Raskin 2014, Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Salam, Kepala Dusun Kadipolo Wetan dan RTS-PM.
2.	Evaluasi Kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tahun 2014.	1. Hasil Evaluasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin).	Wawancara, dokumentasi dan observasi	Kepala Desa Salam, Buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, RTS-PM penerima Raskin, Wawancara Kepala Dusun Kadipolo Wetan.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁴² Dengan metode wawancara maka penulis akan mendapatkan data tentang pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) dan evaluasi Raskin yang ada di Dusun Kadipolo Wetan, dalam mengumpulkan data lapangan itu dilaksanakan pada tanggal 14-28 Desember 2015 sesuai dengan Surat Izin Penelitian. Sumber data yang didapatkan bersumber dari Kepala Desa Salam, Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Salam, Kepala Dusun Kadipolo Wetan, Ketua RT 01 Bapak Giri Karsono, Bapak Slamet Sasongko, Ibu Siti Mukaromah, Ibu Nur sebagai informan. Teknik wawancara yang digunakan peneliti menggunakan terstruktur dan tak terstruktur.

b. Observasi

Pada observasi ini lebih ditekankan pada pengamatan yang tampak dari pelaksanaan program Raskin di Dusun Kadipolo Wetan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua jenis observasi, yaitu observasi pra wawancara dan observasi setelah wawancara.

⁴²S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm. 113.

Observasi sebelum wawancara peneliti lakukan dengan teknik awal sekedar mengamati dengan cara berkunjung dan melihat lingkungan Dusun Kadipolo Wetan beserta kondisi sosial masyarakatnya serta untuk mengetahui lebih detail wilayah yang dijadikan lokasi penelitian. Kemudian melakukan pengamatan secara langsung saat pembagian Raskin kepada penerima Raskin. Setelah itu melakukan wawancara secara mendalam kepada subyek penelitian yaitu Kepala Desa Salam, Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Salam, Kepala Dusun Kadipolo Wetan, Ketua RT 01 Bapak Giri Karsono, Bapak Slamet Sasongko, Ibu Siti Mukaromah, Ibu Nur sebagai informan, serta terus melakukan pengamatan lokasi yang berkaitan dengan perolehan wawancara.

Observasi setelah wawancara ini dilakukan untuk memperoleh kesesuaian data yang ada di lapangan dengan informasi yang diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Kegiatan ini dilakukan peneliti dalam mengunjungi lapangan penelitian terkait pencarian data, dikarenakan peneliti mengharapkan data yang benar-benar valid dan sesuai antara pembicaraan dan kenyataan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴³ Dalam dokumentasi ini peneliti melakukan pendokumentasian berupa catatan ataupun merekam hasil wawancara

⁴³H.M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 121.

dengan subyek penelitian, mengambil gambar lokasi atau obyek penelitian. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan data yang autentik dan jelas serta tidak ada yang ganjil dalam penelitian yang dilakukan.

Gambar yang didapatkan oleh peneliti berupa lokasi Dusun Kadipolo Wetan, infrastruktur jalan masuk Dusun Kadipolo Wetan, foto Kantor Desa Salam, Raskin turun dari truk BULOG. Kemudian juga mendapatkan catatan-catatan kegiatan diskusi kebijakan Dusun setempat terkait Daftar Penerima Raskin. Selain itu peneliti juga memperoleh data Berita Acara tentang musyawarah Dusun terkait kebijakan Raskin guna memperkuat bukti kegiatan yang telah dilakukan.

7. Validitas Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengujian terhadap keabsahan data. Upaya untuk memvalidkan data adalah dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi data digunakan untuk mengecek kebenaran dan penafsiran data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dan di luar itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu.

Triangulasi digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber, yaitu membandingkan wawancara dengan pengamatan (observasi), membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia,

membandingkan dokumentasi dengan observasi dan membandingkan hasil wawancara dengan wawancara informan yang lain.⁴⁴ Agar penelitian ini memiliki hasil kepercayaan yang tinggi sesuai apa yang ada di lapangan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersamaan. Dengan demikian, maka keabsahan data diperoleh tidak hanya dengan menggunakan salah satu metode saja. Peneliti dapat memperhatikan bagaimana cara berbicara atau intonasi berbicara sang informan. Dengan teknik ini peneliti menganalisis mulai dari wawancara, kemudian ditanyakan melalui observasi dan dilanjutkan dengan mencari bukti dengan mengambil gambar.

8. Analisis Data

Proses analisis data ini peneliti lakukan mulai dari memilah dan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar peneliti mudah dalam mengambil dan memasang data serta melakukan analisis dengan teori yang telah di tentukan. Kemudian analisis dilakukan untuk melihat apakah teori yang dipilih dengan data yang ada di lapangan sesuai atau tidak.

Analisis ini peneliti lakukan dengan langkah pertama kali menuliskan hasil wawancara yang diperoleh, kemudian menyusun

⁴⁴Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), Bandung: Alfabeta

kedalam data-data tertentu seperti kebutuhan untuk BAB II dan data kebutuhan untuk BAB III. Setelah data terpilah maka kemudian peneliti menyusun sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan. Kemudian peneliti melakukan analisis kesesuaian data yang diperoleh dengan observasi, dokumentasi dan teori yang digunakan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dalam melakukan pembahasan penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan kedalam empat bab yang setiap bab berbentuk uraian dan saling terkait antara satu bab dengan bab yang lain.

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai gambaran umum dari Dusun Kadipolo Wetan yang mencakup keadaan lokasi baik mengenai letak geografis, kondisi sosial masyarakatnya dan penjelasan tentang pelaksanaan dan evaluasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin).

Bab III membahas tentang pelaksanaan dan evaluasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

Bab IV merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian dan pembahasan melalui data-data di lapangan mengenai pelaksanaan Raskin dan hasil evaluasi Raskin tahun 2014 di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Program Raskin di Dusun Kadipolo Wetan

a. Perencanaan dan Penganggaran

Penganggaran Raskin pada tahun 2014 menggunakan dana APBN dalam memberikan subsidi yang telah menjadi program Pemerintah ini yaitu program Raskin.

b. Pengelolaan dan Pengorganisasian

Pengelola dalam implementasi Raskin ini ada banyak pihak terkait yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan Raskin antara lain Tim Koordinasi Raskin Pusat, Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Tengah, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Magelang, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Salam, Pelaksana Distribusi Raskin di Desa Salam.

c. Kebijakan Penganggaran

Segala kegiatan Tim Koordinasi Raskin serta satker Raskin dibiayai dari APBD dan atau BOP Perum BULOG, selain pembiayaan dari APBN

dan APBD masyarakat juga dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin.

d. Sosialisasi Raskin

Sosialisasi Raskin yang dilakukan di Dusun Kadipolo Wetan yaitu Kepala Dusun mengumumkan kalau Raskin sudah turun lalu disampaikan pada saat pertemuan-pertemuan pengajian, pertemuan RT, pertemuan Lembaga Takmir Masjid (LTM) dan lainnya.

e. Penyaluran Raskin

Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi menjadi tugas dan tanggungjawab perum BULOG. Setelah beras sampai di Titik Distribusi maka segera diinstruksikan kepada para Kepala Dusun yang ada di Desa Salam agar cepat mengambil Raskin dan dibawa ke Titik Distribusi agar RTS-PM dapat segera mengambil dan melunasi Raskin tanpa ada keterlambatan pembayaran.

Dengan masih ditemukannya beras dengan kualitas rendah, Raskin berbau apek, berketu dan berwarna kuning menunjukkan bahwa Raskin yang diterima oleh RTS-PM tidak layak konsumsi. Selain itu kondisi infrastruktur jalan masuk Dusun Kadipolo Wetan kondisinya berbatu, berlobang dan mengkhawatirkan sehingga dapat menghambat pendistribusian Raskin dari Desa Salam ke Dusun Kadipolo Wetan.

f. Pembayaran Uang HTR (Harga Tebus Raskin)

Pembayaran Harga Tebus Raskin dari RTS-PM adalah langsung ke tempat pengambilan Raskin yaitu di rumah Ibu Siti Mukaromah. Untuk pengambilan Raskin itu dibayar langsung saat mengambil Raskin tersebut guna memperlancar distribusi Raskin pada bulan berikutnya.

2. Hasil Evaluasi Kebijakan Program Raskin di Dusun Kadipolo Wetan

Dalam musyawarah evaluasi Raskin di masyarakat Dusun Kadipolo Wetan yaitu membahas tentang adanya kecemburuan sosial di masyarakat dan dilaksanakan di serambi Masjid Kamal Iman. Adanya ancaman dari warga lain yang tidak terdaftar dalam penerima Raskin mereka mengancam tidak akan pernah mengikuti kegiatan sosial di masyarakat salah satunya yaitu gotong royong. Hal ini akan menghambat stabilitas sosial.

Hasil dari musyawarah tersebut adalah pihak RTS-PM pokok memberikan sebagian jatah Raskin yang mereka dapatkan dengan suka rela kepada warga yang benar-benar miskin namun tidak terdaftar sebagai penerima Raskin dengan tujuan mengurangi kecemburuan sosial dan agar stabilitas sosial di masyarakat itu membaik seperti semula yang aman, tenteram damai. Dalam musyawarah itu Kepala Dusun dan Ketua RT hanya sebagai fasilitator dan menjembatani pelaksanaan musyawarah evaluasi tersebut.

B. Saran-Saran

1. Program Raskin ini merupakan program yang sangat penting bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sekiranya Pemerintah dapat lebih memperhatikan lagi penyaluran dan memperbaiki kualitas Raskin ini agar benar-benar tujuan dari Raskin tersebut dapat tercapai guna mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami di Negara ini, khususnya di Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam.
2. Diharapkan kepada Pemerintah khususnya di Kabupaten Magelang dapat membuat kebijakan mengenai Raskin untuk dikelola dengan baik, dan kiranya lebih diperhatikan lagi pemberian Raskin ini agar tidak salah tangan.
3. Diharapkan pengurus mampu lebih melibatkan warga masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan dan meningkatkan sosialisasi Raskin kepada warga.
4. Diharapkan untuk Pemerintah Desa Salam agar dalam membuat perencanaan Raskin dapat lebih matang dan maksimal dengan tujuan pelaksanaan berjalan dengan baik.
5. Segera dilaksanakan musyawarah dengan forum RT dan RW agar dapat diketahui mana yang pembayaran Raskinnya belum lunas.
6. Untuk RTS-PM yang sering menunggak pembayaran Raskin karena kesengajaan, sebaiknya jangan diulangi agar pelaksanaan Distribusi Raskin tetap berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bungin, H.M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kartoredjo, H. S, *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, *Pedoman Umum Raskin Beras Untuk Rumah Tangga Miskin*, Jakarta: Bidang Kesejahteraan Rakyat, 1991.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Nasution, S., *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nugroho, Riant, *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- HadiSutrisno, *Metodologi Research* jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Upe, Ambo dan Damsid, *Asas-Asas Multiple Researches*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Intan Pariwara, 2011.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Pringwulung: Media Pressindo, 2007.

Yusuf, Farida, *Evaluasi Program*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

2. Skripsi, Tesis, Artikel, Jurnal

S, Shin Auly Frida, *Efektivitas Pelaksanaan Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) Studi Kasus di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kotta Solok*, skripsi, Padang: Universitas Andalas, 2011.

Puspasari, Debie *Efektivitas Pelaksanaan Program Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2010 Di Kota Depok dan Kota Cimahi*, skripsi, Depok, 2012.

Arif Wahyudi, *Evaluasi Kinerja Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Pelaksanaan 2008 di Kecamatan Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong)*, tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Rismannafar Tri Darajat, *Analisis Kebijakan Publik*, tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

3. Media Internet

Rosdy Ruslan, *Pengertian Metode Penelitian*, <http://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/> diakses pada tanggal 23 September 2015.

Wikipedia Bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title:Kebijakan_Publik&oldid=11117081 diakses pada tanggal 19 Desember 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN FOTO

Gambar 1 : Raskin di Desa Salam



Sumber : Dokumentasi pribadi tanggal 14 Desember 2015.

Gambar 2 : Penghitungan Raskin oleh Petugas BULOG



Sumber : Dokumentasi Pribadi tanggal 10 Desember 2015.

Gambar 3 : Raskin Turun di Desa Salam



Sumber : Dokumentasi pribadi tanggal 24 Desember 2015.

Gambar 4 : Raskin saat masih di dalam truk BULOG



Sumber : Dokumentasi Pribadi tanggal 10 Desember 2015.

Gambar 5 : Raskin turun dari BULOG



Sumber : Dokumentasi Pribadi tanggal 10 Desember 2015.

Gambar 6 : Plakat Dusun Kadipolo Wetan



Sumber : Dokumentasi Pribadi tanggal 10 Desember 2015.

Gambar 7 : Raskin di Rumah Ibu Siti Mukaromah



Sumber : Dokumentasi Pribadi tanggal 10 Desember 2015.

Gambar 8 : Kantor Desa Salam



Sumber : Dokumentasi Pribadi tanggal 10 Desember 2015.

Gambar 9 : Kantor Balai Desa Salam



Sumber : Dokumentasi Pribadi tanggal 10 Desember 2015.

Gambar 10 : Raskin di Titik Bagi Dusun Kadipolo Wetan



Sumber : Dokumentasi Pribadi tanggal 10 Desember 2015.

Gambar 11 : Lokasi Persawahan Lingkungan Dusun Kadipolo Wetan



Sumber : Dokumentasi Pribadi tanggal 10 Desember 2015.

Gambar 12 : Kondisi Infrastruktur Jalan yang Rusak



Sumber : Dokumentasi Pribadi tanggal 10 Desember 2015.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616
KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 18 Desember 2015.

Nomor : 070 / 781 / 14 / 2015
Lampiran : 1 (satu) buku.
Perihal : Rekomendasi.

Kepada :
Yth, Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Magelang.

Di -
KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari BPMD Provinsi Jateng..
Nomor : 070/3123/04.5/2015
Tanggal : 15 Desember 2015.
Tentang : Rekomendasi Penelitian
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian/ Riset / Survey / PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : MUHAMMAD RIFKI HABIBI HIDAYATULLOH .
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa.
 - c. Alamat : Kadipolo Wetan Rt. 006/ Rw. 010, Desa Salam, Kec. Salam, Kab. Magelang
 - d. Penanggung Jawab : Siti Aminah, S.Sos, M.Si.
 - e. Lokasi : Kabupaten Magelang.
 - f. Waktu : 28 Desember 2015 s/d 28 Januari 2016.
 - g. Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta..
 - h. Tujuan : mengadakan penelitian, dengan judul :
" EVALUASI KEBIJAKAN RASKIN DI DUSUN KADIPOLO WETAN DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG "
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

WARDI SUTRISNO, BA

Penata Tk. I

NIP. 19590205 198503 1 012

Tembusan,
1. Bp. Bupati Magelang (Tanpa lampiran).
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.
(Tanpa Lampiran)



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 28 Desember 2015

Nomor : 071/ 380/59/2015
Sifat : Amat segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth **MUHAMMAD RIFKI HABIBI**
HIDAYATULLOH
Kadipolo Wetan RT 006 RW 010 Desa
Salam Kec. Salam Kab. Magelang

di

SALAM

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor :
070/781/14/2015 Tanggal 18 Desember 2015, Perihal Kegiatan
Riset/Penelitian/PKL di Kabupaten Magelang.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian
/PKL di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : **MUHAMMAD RIFKI HABIBI HIDAYATULLOH**
Pekerjaan : Mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Kadipolo Wetan RT 006 RW 010 Desa Salam Kec. Salam Kab.
Magelang
Penanggung Jawab : **Siti Aminah, S.Sos, M.Si**
Lokasi : Dsn. Kadipolo Wetan Desa Salam Kec. Salam Kabupaten Magelang
Waktu : 28 Desember 2015 s/d 28 Januari 2016
Peserta : -
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan Judul :
" **EVALUASI KEBIJAKAN RASKIN DI DUSUN KADIPOLO WETAN,
DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG** "

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Penelitian/PKL agar Saudara Mengikuti Ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak
mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

an. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG

Ub.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

TRI PURWANTI, S.Sos

Pembina

NIP. 19630811 198607 2 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas Kantor/Instansi terkait



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/3123/04.5/2015

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/2586/Kesbang/2015 tanggal 23 November 2015 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MUHAMMAD RIFKI HABIBI HIDAYATULLOH.
2. Alamat : Kadipolo Wetan RT.006/RW.010, Desa Salam, Kec. Salam, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Pekerjaan : Mahasiswa.

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : EVALUASI KEBIJAKAN RASKIN DI DUSUN KADIPOLO WETAN, DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014.
- b. Tempat / Lokasi : Dusun Kadipolo Wetan, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
- c. Bidang Penelitian : Evaluasi Kebijakan.
- d. Waktu Penelitian : 15-12-2015 s.d. 31-12-2015
- e. Penanggung Jawab : Siti Aminah, S. Sos. I., M.Si.
- f. Status Penelitian : Baru.
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 15 Desember 2015

Pit. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Nomor : 070/5796/2015
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Semarang, 15 Desember 2015

Kepada
Yth. Bupati Magelang
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol
Kab. Magelang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/3123/04.5/2015 Tanggal 15 Desember 2015 atas nama MUHAMMAD RIFKI HABIBI HIDAYATULLOH dengan judul proposal EVALUASI KEBIJAKAN RASKIN DI DUSUN KADIPOLO WETAN, DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama



Dra. ASIH WIDHIASTUTI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19620920 198803 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- ④ 4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. MUHAMMAD RIFKI HABIBI HIDAYATULLOH.

شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.23.10.1308/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Muhammad Rifki Habibi Hidayatulloh :

تاريخ الميلاد : ١٦ مارس ١٩٩٤

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢ فبراير ٢٠١٦, وحصل على
درجة :

٤٩	فهم المسموع
٤٢	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٥	فهم المقروء
٣٨٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا, ٢ فبراير ٢٠١٦

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨.٩١٥١٩٩٨.٣١٠٠٥



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.23.9.3163/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **MUHAMMAD RIFKI HABIBI
HIDAYATULLOH**

Date of Birth : **March 16, 1994**

Sex : **Male**

took TOEC (Test of English Competence) held on **February 17, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	57
Structure & Written Expression	41
Reading Comprehension	58
Total Score	520

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, February 17, 2016
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : MUHAMMAD RIFKI HABIBI HIDAYATULLOH
NIM : 12230035
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012

a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Muhammad Rifki Habibi Hidayatulloh
NIM : 12230035
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	75	B
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	87.5	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	

KEMENTERIAN Agama RI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Yogyakarta, 22 Maret 2016
Kepala PTIPD

Agung Fatwanto, Ph.D.
NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



Sertifikat

19.PAN-OPAK.UNIV.UIN.YK.AA.09.2012

Diberikan kepada

MAMAD RIFKI HABIBI
HIDAYATULLOH

Sebagai

Peserta OPAK 2012



Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2012
yang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik &
Kemahasiswaan (OPAK) 2012 dengan tema:
**MEMUPUK NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM RUANG KAMPUS ;
UPAYA MEMPERKOKOH INTEGRITAS BANGSA**

pada tanggal 5-7 September 2012 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengetahui,

Yogyakarta, 7 September 2012

Pembaru Rektor JJJ

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. H. Ahmad Rifai, S. Phil.
NIP. 19600905 198603 1006

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

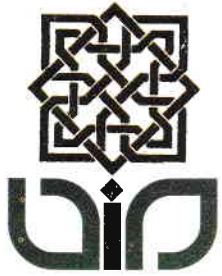
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abdul Khalid
Presiden Mahasiswa

Panitia OPAK 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Romel Maspykuri
Ketua Panitia



34

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.791/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Muhammad Rifki Habibi Hidayatulloh
Tempat, dan Tanggal Lahir : Magelang, 16 Maret 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 12230035
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

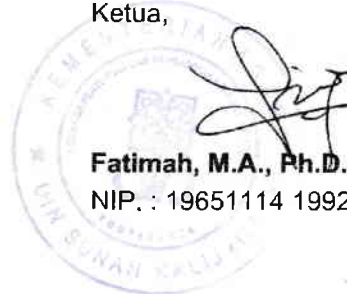
Lokasi : Banjarharjo
Kecamatan : Kalibawang
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,27 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Ketua,



Fatimah, M.A., Ph.D.
NIP. : 19651114 199203 2 001



LABORATORIUM AGAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

MUHAMMAD RIFKI HABIBI HIDAYATULLOH

12230035

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 13 Juni 2014
Ketua

Dr. Sriharini, M.Si

NIP. 19710526 199703 2 001



Dekan

Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMEN

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUSTAKA
DI LUAR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rifki Habibi Hidayatulloh

NIM : 12230035

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat : Kadipolo Wetan, Salam, Salam, Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan UGM, UNY, UII, Perpustakaan daerah (Perpusda) Yogyakarta dan perpustakaan lainnya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila tidak sesuai dengan pernyataan maka saya siap menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 April 2016

Yang menyatakan


Muhammad Rifki Habibi Hidayatulloh
12230035

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Rifki Habibi Hidayatulloh
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 16 Maret 1994
Alamat : Kadipolo Wetan, Salam, Salam, Magelang, Jawa Tengah
Nama Ayah : Wiyono
Nama Ibu : Nurkhayati

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Salam Magelang tahun 2000/2001
2. SD N Salam Magelang tahun 2005/2006
3. SMPN 3 Salam Magelang tahun 2008/2009
4. SMKN 1 Salam tahun 2009/2012